



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 175 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 1
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PENGELUARAN,
BENDAHARAWAN PENERIMA, PEMBANTU BENDAHARAWAN DAN
BENDAHARAWAN BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD) SERTA BENDAHARAWAN SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH (SKPKD) ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN SATUAN
KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) DALAM
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2010.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka dipandang perlu menunjuk kembali Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima, Pembantu Bendaharawan dan Bendaharawan Barang serta Atasan Langsung Bendaharawan pada Satuan Kerja dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 1 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima, Pembantu Bendaharawan dan Bendaharawan Barang serta Atasan Langsung Bendaharawan pada Satuan Kerja Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3569);
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3865)

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembar Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang 17 Tahun.2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 199);
27. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penunjukan Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima, Pembantu Bendaharawan dan Bendaharawan Barang serta atasan langsung Bendaharawan pada Satuan Kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 yang Nama, Nip dan Jabatan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 4 JUNI 2010

BUPATI,

LARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Para Kepala Satuan Kerja se Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palopo;
8. Kepala Cabang Bank Sul-Sel Masamba di Masamba;
9. Kepala Cabang Bank BNI Masamba di Masamba;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 175 TAHUN 2010
TANGGAL 04 JUNI 2010

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 1 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARAWAN PENGELUARAN, BENDAHARAWAN PENERIMAAN,
PEMBANTU BENDAHARAWAN PENERIMAAN DAN BENDAHARAWAN BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
SERTA BENDAHARAWAN SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SKPKD) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2010

No. Urut.	Nama / Nip	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Atasan Langsung
1	Sitti Wahyuni Nip. 19770912 200701 2 014	Pengatur Muda II/a	Bendaharawan Pengeluaran Kantor Lingkungan Hidup	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD
2	Salmia Nip. 19820209 200901 2 001	Pengatur Muda II/a	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran (Pembuat Daftar Gaji / SPP dan SPM Gaji)	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Pengeluaran
3	Asrianto Nip. 19770616 200701 1 021	Pengatur Muda II/a	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran (Pembuat Dokumen Transaksi Pengeluaran, SPP dan SPM Non Gaji).	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Pengeluaran
4	Nirwana Nip. 19831205 200901 2 002	Pengatur Muda II/a	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran (Pembuat Dokumen Transaksi Pengeluaran, Pencatat Pembukuan).	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Pengeluaran
5	Rakmat Nip. 19690531 200901 1 002	Pengatur Muda II/a	Bendaharawan Barang	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD
6	Wahida Tahir, SE Nip. 580 066 334	Penata Muda III/a	Bendaharawan Pengeluaran Inspektorat Kabupaten	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD
7	Idarwati, A. Md Nip. 19790818 220801 2 010	Pengatur II/c	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran (Pembuat Daftar Gaji / SPP dan SPM Gaji)	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Pengeluaran
8	Rini Pur Nip. 19801218 200701 2 007	Pengatur Muda II/a	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran (SPP dan SPM Non Gaji)	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Pengeluaran
9	Sapira Nip. 19701104 200701 2 015	Pengatur Muda II/a	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran (Pembuat Dokumen Transaksi Pengeluaran, Pencatat Pembukuan).	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Pengeluaran
10	Susiyanti Nip. 19830905 201001 2 004	Pengatur Muda II/a	Bendaharawan Barang	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD

No. Urut.	Nama / Nip	Pangkat Golongan	Jabatan	Atasan Langsung
11	Rahmawaty A.Md. Nip. 580 050 880	Pengatur III/c	Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD
12	Tenri Sahta Nip. 19761111 200701 2 019	Pengatur III/c	Bendaharawan Pengeluaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	Bertanggung Jawab Kepada Kepala PPKD
13	Mervis Nip. 580 051 128	Pengatur Muda III/a	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran (Pembuat Daftar Gaji / SPP dan SPM Gaji)	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Pengeluaran
14	Uminarri Syam, S.Sos. Nip. 19761231 200701 2 047	Pengatur Muda III/a	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran (Pembuat Dokumen Transaksi Pengeluaran Non Gaji)	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Pengeluaran
15	Rahmawati Nip. 580 051 063	Pengatur Muda III/a	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran (Pembuat Dokumen Transaksi Pengeluaran)	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Pengeluaran
16	Nuryeti Idrus, SE Nip. 580 041 517	Penata Muda TK.I III/b	Bendaharawan Penerima	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD
17	ST. Hamrah Nip. 19831219 201001 2 002	Pengatur Muda III/a	Pembantu Bendaharawan Penerimaan (Pembuat Dokumen Transaksi Penerimaan, Pencatat Pembukuan).	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Penerimaan
18	Husraini Abidin Nip. 580 051 019	Pengatur Muda III/a	Pembantu Bendaharawan Penerimaan (Pembuat Dokumen Transaksi Penerimaan, Pencatat BUD).	Bertanggung Jawab Kepada BUD
19	Jurnaini Adi Jaya Nip. 580 064 809	Pengatur Muda III/a	Pembantu Bendaharawan Penerimaan (Menginput Penerimaan)	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Penerimaan
20	Nurmawati Nip. 580 051 034	Pengatur Muda III/a	Pembantu Bendaharawan Penerimaan (Pengeloa Benda Berharga)	Bertanggung Jawab Kepada Kepala Bidang Pendapatan
21	Mardia Nip. 580 029 438	Penata Muda TK I III/b	Bendaharawan Barang	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD
22	Nurwulan Nip. 19820614 200901 2 001	Pengatur Muda III/a	Bendaharawan Pengeluaran Pemerintah Kecamatan Sabbang	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD
23	Siti Syarifah Nip. 580 051 181	Pengatur Muda III/a	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran (SPP dan SPM Non Gaji, Pembuat Dokumen Transaksi Pengeluaran, Pencatat Pembukuan).	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Pengeluaran
24	Kasnad M. Nip. 580 018 779	Pengatur Muda III/a	Bendaharawan Penerima	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD
25	Jaya Nip. 19810412 200901 1 003	Pengatur Muda III/a	Bendaharawan Barang	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD

No. Urut.	Nama / Nip	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Atasan Langsung
26	Mersi, A.Md Nip. 19751010 201001 2 001	Pengatur III/c	Bendaharawan Pengeluaran Pemerintah Kecamatan Sukamaju	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD
27	Supri Ambodo, S.Sos. Nip. 19690520 200312 1 007	Pengatur Muda II/a	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran (Pembuat Daftar Gaji / SPP dan SPM Gaji)	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Pengeluaran
28	Henni Jasila, M Nip. 19780301 200701 2 013	Pengatur Muda II/a	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran (SPP dan SPM Non Gaji)	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Pengeluaran
29	Rahman Arif Nip. 19541231 198611 1 037	Pengatur Muda Tk. I II/b	Bendaharawan Penerima	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD
30	Juhartono Nip. 19630625 199303 1 005	Penata Muda Tk. I III/b	Bendahara Barang	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Penerimaan
31	Adratu Nip. 19820121 200801 2 012	Pengatur Muda II/a	Bendaharawan Pengeluaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD
32	Adnan Nip. 19800515 200801 1 019	Pengatur Muda II/a	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran (SPP dan SPM Non Gaji Pembuat Dokumen Transaksi Pengeluaran, Pencatat Pembukuan).	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Pengeluaran
33	Mustadir Nip. 19800821 201001 1 002	Pengatur Muda II/a	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran (Pembuat Daftar Gaji / SPP dan SPM Gaji)	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Pengeluaran
34	Abd. Hafid Fachri Nip. 580 029 399	Pengatur Muda Tk. I II/b	Bendaharawan Barang	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD
35	Nirwana Muis Jaya, S.PI Nip. 580 050 901	Penata Muda III/a	Bendaharawan Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD
36	Saderiah Nip. 19771022 200701 2 008	Pengatur Muda II/a	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran (Pembuat Daftar Gaji / SPP dan SPM Gaji)	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Pengeluaran
37	Subiha Junalni Nip. 19730331 200701 2 011	Pengatur Muda II/a	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran (Pembuat SPP / SPM Non Gaji)	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Pengeluaran
38	Vida Pratiwi, S.Kel Nip. 19801005 200901 2 003	Penata Muda III/a	Bendaharawan Penerima	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD
39	Yudith S. Basri, A.Md Nip. 19680907 200701 2 026	Pengatur II/c	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran (Pembuat Dokumen Transaksi Pengeluaran, Pencatat Pembukuan).	Bertanggung Jawab Kepada Bendaharawan Pengeluaran
40	Syahrul Nip. 580 029 410	Pengatur Muda Tk. I II/b	Bendaharawan Barang	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD

No. Urut.	Nama / Nip	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Atasan Langsung
41	Adriana Umar, A.Md Nip. 580 064 369	Pengatur II/c	Bendaharawan Pengeluaran Pemerintah Kelurahan Marobo	Bertanggung Jawab Kepada Kepala SKPD
42	R u s l i Nip. 19710228 200906 1 001	Pengatur Muda II/a	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Bertanggung Jawab Kepada Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di Masamba,
Pada tanggal 4 Juni 2010

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI